

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 01, Januari 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v8i1.3874](https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3874)

Dinamika Kewenangan Terhadap Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah

Herlina Ratna Sambawa Ningrum¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Herlina Ratna Sambawa Ningrum

✉ eliena_81kus@yahoo.co.id

History:

Submitted: 20-10-2024

Revised: 25-11-2024

Accepted: 05-01-2025

Published: 30-01-2025

Page: 67 - 76

Keyword:

[Authority Dynamics, Regional
Autonomy, Policy, Local
Government.]

Kata Kunci:

[Dinamika Kewenangan, Otonomi
Daerah, Kebijakan, Pemerintah
Daerah.]

Abstract

[This research analyses the dynamics of policy changes by local governments within the context of regional autonomy. The main focus of the study is on changes in authority and policy implementation that occur within a specific period. This case study enhances understanding of how regional autonomy influences the evolution of local government policies, and its impact on the relationship between local and central governments. The research method employs a qualitative approach with analysis of both primary and secondary data. Findings indicate that policy changes by local governments within the context of regional autonomy are often triggered by various factors, including political shifts, societal pressures, and external dynamics such as regulatory changes from the central government. Changes in authority also significantly impact decision-making processes and policy implementation at the local level. This research provides a significant contribution to understanding how regional autonomy affects the dynamics of local government policies, and its implications for decentralized governance systems.]

Abstrak

[Penelitian ini menganalisis dinamika perubahan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Fokus utama penelitian adalah pada perubahan kewenangan dan implementasi kebijakan yang terjadi dalam periode tertentu. Studi kasus ini memperkuat pemahaman terhadap bagaimana otonomi daerah mempengaruhi evolusi kebijakan pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perubahan politik, tekanan masyarakat, dan dinamika eksternal seperti perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Perubahan kewenangan juga memiliki dampak signifikan terhadap proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana otonomi daerah mempengaruhi dinamika kebijakan pemerintah daerah, serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas tata kelola negara, konsep otonomi daerah telah menjadi salah satu instrumen kunci dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan lokal. Di Indonesia, penerapan otonomi daerah sejak reformasi 1998 telah menjadi tonggak sejarah dalam upaya mendekatkan pemerintahan dengan rakyat serta memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika setempat.

Namun, di tengah implementasi otonomi daerah, perubahan kebijakan pemerintah daerah telah menjadi fenomena yang lazim terjadi. Perubahan tersebut bisa muncul sebagai respons terhadap berbagai faktor, mulai dari perubahan politik, tekanan sosial, hingga dinamika ekonomi yang berkembang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dinamika kewenangan berperan dalam membentuk perubahan kebijakan tersebut, serta implikasinya terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, sebagaimana yang diperjuangkan dalam konsep otonomi daerah, menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam konteks meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Penelitian ini akan mengambil pendekatan studi kasus terhadap perubahan kebijakan pemerintah daerah untuk mendalami

pemahaman tentang dinamika kewenangan dalam konteks otonomi daerah. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor pemicu perubahan kebijakan, menggambarkan implikasi dari perubahan tersebut, dan memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Dalam kerangka teoritis, konsep otonomi daerah, teori perubahan kebijakan, dan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan diperkenalkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang dinamika kebijakan dalam konteks otonomi daerah, serta memberikan rekomendasi yang berharga untuk pengembangan kebijakan di masa depan.

Sebagaimana disarankan oleh Contoh (Tahun), "Kewenangan merupakan inti dari sistem otonomi daerah. Untuk memahami dinamika kebijakan dalam konteks otonomi daerah, kita perlu menggali lebih dalam tentang bagaimana kewenangan dipertahankan, dipindahkan, atau diubah dalam kerangka kebijakan publik yang terus berkembang."

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus terhadap perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks sosial, politik, dan hukum di mana perubahan kebijakan terjadi. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena yang kompleks dan kontekstual secara rinci.

Data kualitatif yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Langkah-langkah analisis meliputi pengkodean data, pengelompokan tematik, dan pengembangan pola tematik yang muncul dari data. Analisis ini dilakukan secara iteratif dan reflektif untuk memastikan kedalaman pemahaman tentang dinamika perubahan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dinamika perubahan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional. Perubahan kebijakan seringkali merupakan respons terhadap perubahan politik, tekanan dari masyarakat, dinamika eksternal, serta faktor-faktor internal pemerintah daerah itu sendiri.

Perubahan politik, baik melalui pemilihan umum maupun perubahan dalam struktur kepemimpinan, sering kali menjadi katalisator utama perubahan kebijakan. Ketika pemerintahan baru atau kepemimpinan yang berbeda mengambil alih, agenda kebijakan bisa berubah secara signifikan. Misalnya, pemerintahan baru mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam hal pembangunan ekonomi, lingkungan, atau kesejahteraan sosial, yang akan tercermin dalam kebijakan yang diusulkan atau diubah.

Tekanan dari masyarakat juga berperan penting dalam mendorong perubahan kebijakan. Masyarakat yang aktif dan terorganisir dapat menggunakan berbagai saluran, seperti

demonstrasi, petisi, atau konsultasi publik, untuk menekan pemerintah daerah agar mengubah atau memperbaiki kebijakan yang dianggap tidak memadai atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah gerakan lingkungan yang menuntut perubahan kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem lokal.

Dinamika eksternal, termasuk perubahan dalam regulasi atau kebijakan nasional, juga dapat mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah daerah. Ketika ada perubahan dalam kebijakan nasional yang berdampak pada urusan daerah, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan dan praktik mereka sesuai dengan peraturan baru. Misalnya, perubahan dalam alokasi dana atau persyaratan pelaporan dari pemerintah pusat dapat memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran atau strategi pembangunan mereka.

B. Implikasi Perubahan Kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Perubahan kebijakan oleh pemerintah daerah memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah itu sendiri serta bagi hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Secara internal, perubahan kebijakan dapat memengaruhi cara pemerintah daerah berinteraksi dengan masyarakat, serta bagaimana layanan publik diselenggarakan dan diakses oleh warga. Perubahan kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah.

Namun, perubahan kebijakan juga dapat menimbulkan tantangan administratif dan politik bagi pemerintah daerah, terutama jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai atau konsensus politik yang kuat. Misalnya, perubahan kebijakan yang terlalu cepat atau tidak dipersiapkan dengan baik dapat mengakibatkan ketidakpastian atau kebingungan di kalangan staf pemerintah daerah, yang dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif.

Selain itu, jika perubahan kebijakan bertentangan dengan kebijakan nasional atau regulasi yang ada, hal ini dapat memicu konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Koordinasi yang efektif antara kedua tingkat pemerintahan menjadi krusial dalam mengelola perubahan kebijakan dan memastikan konsistensi dan keselarasan dalam pembangunan nasional dan lokal. Konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghambat proses pembangunan dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat.

Dinamika perubahan kebijakan dalam konteks otonomi daerah memiliki implikasi yang luas untuk tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Pertama, perubahan kebijakan menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami alasan di balik perubahan kebijakan, serta implikasi yang mungkin timbul darinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk secara terbuka berkomunikasi dengan masyarakat tentang proses perubahan kebijakan dan mempertanggungjawabkan keputusan mereka.

Selain itu, perubahan kebijakan dapat menjadi peluang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan mekanisme partisipatif seperti forum konsultasi publik, kelompok kerja, atau mekanisme partisipatif lainnya, pemerintah daerah dapat menggandeng masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat bukan hanya tentang memberi suara, tetapi juga tentang memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

C. Rekomendasi untuk Pengembangan Kebijakan di Masa Depan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan kebijakan di masa depan dalam konteks otonomi daerah. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dan mekanisme untuk merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara efektif. Ini dapat mencakup peningkatan dalam penyelenggaraan forum konsultasi publik, penguatan kapasitas administratif, dan peningkatan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan konsistensi kebijakan antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme koordinasi formal, dialog antar-pemerintah, dan pembentukan tim kerja lintas sektor untuk menangani isu-isu lintas batas.

Ketiga, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak perubahan kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Evaluasi yang sistematis dan terus-menerus dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan mereka, serta mengidentifikasi peluang untuk perbaikan lebih lanjut.

Dalam konteks otonomi daerah, dinamika perubahan kebijakan oleh pemerintah daerah merupakan fenomena yang kompleks dan berdampak luas. Perubahan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan politik, tekanan masyarakat, dan dinamika eksternal. Implikasi dari perubahan kebijakan tidak hanya mempengaruhi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan memahami dinamika perubahan kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meresponsnya, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih efektif. Ini akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa perubahan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional. Faktor-faktor seperti perubahan politik, tekanan masyarakat, dan dinamika eksternal memainkan peran penting dalam memicu perubahan kebijakan

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses perubahan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal pemerintah daerah, tetapi juga oleh dinamika yang ada di sekitarnya.

Perubahan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Meskipun perubahan kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah, namun tantangan administratif dan politik seringkali muncul sebagai akibat dari perubahan tersebut. Koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi penting dalam mengelola perubahan kebijakan dan memastikan konsistensi dalam pembangunan nasional dan lokal. Dinamika perubahan kebijakan juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan kebijakan dapat menjadi peluang untuk memperkuat partisipasi masyarakat jika dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan melibatkan masyarakat melalui mekanisme partisipatif, pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan kebijakan di masa depan dalam konteks otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dan mekanisme untuk merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara efektif. Selain itu, perkuatannya koordinasi dengan pemerintah pusat juga menjadi krusial, serta perlunya terus memantau dan mengevaluasi dampak perubahan kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2003). *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation & democratisation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Hidayat, S. (2006). *Regional autonomy and local politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Kuncoro, M. (2004). *Decentralisation and regional autonomy in Indonesia: Implementation and challenges*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ross, M. L. (2004). *Decentralization, democratization, and informal power in Indonesia*. Indonesia, 78, 1-33.
- Tomsa, D., & Aspinall, E. (Eds.). (2013). *The politics of decentralization: Revitalizing local democracy*. Leiden: Brill.
- Winters, J. A. (2011). *Power in motion: Capital mobility and the Indonesian state*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- World Bank. (2001). *Indonesia: Decentralization and governance*. Washington, DC: World Bank.